

Usai Dilantik, Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Kalimantan Selatan Targetkan Bangun 12.000 Unit Rumah Subsidi



Sumber gambar:

<https://klikkalsel.com/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240507-WA0021-1536x1239.jpg>

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kalimantan Selatan (Kalsel) masa bakti 2024-2028 resmi dilantik dan dikukuhkan, di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Selasa (7/5/2024)

Kegiatan ini dihadiri Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor dan Ketua TP PKK Kalsel, Hj Raudatul Jannah, Ketua Umum DPP Apersi, H Junaidi Abdillah, Sekjen DPP Apersi, Daniel Djumali, Ketua DPD Apersi Kalsel terpilih, Hj Wahidah Mukhtar dan Sekretaris DPD Apersi Kalsel, Muhammad Fikri beserta jajaran pengurus.

Dalam sambutannya, Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel, menyampaikan keberadaan DPD Apersi Kalsel telah memberikan kontribusi nyata yang sangat baik bagi pembangunan di sektor perumahan dan permukiman di Banua.

Paman Birin juga mengucapkan selamat atas dilantik dan dikukuhkannya jajaran pengurus DPD Apersi Kalsel periode 2024-2028. “Semoga DPD APERSI Kalsel terus berkembang dan semakin maju dalam menjalankan peran sebagai organisasi yang menjunjung tinggi profesionalisme dan mendorong terciptanya peningkatan skala usaha perusahaan pengembang dan kualitas penyediaan perumahan dan permukiman di Kalsel,” ujarnya.

Gubernur juga menyebutkan, pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel terus berupaya meningkatkan ketersediaan serta akses perumahan dan kawasan permukiman, sekaligus mengukur dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah.

“Hal ini menjadi salah satu fokus pembangunan di daerah kita. Tentu pemerintah provinsi Kalimantan Selatan tidak dapat bekerja sendiri. Ini diperlukan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak, termasuk DPD Apersi Kalsel,” kata Paman Birin, sekaligus membuka kegiatan.

Sementara, Ketua Umum DPP Apersi H Junaidi Abdillah, mengatakan pihaknya tetap fokus mendukung program pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yaitu program Satu Juta Rumah. “Dan ini nantinya akan meningkat lagi menjadi tiga juta rumah oleh presiden yang akan datang,” ucap Junaidi.

Ia juga berharap, adanya sinergitas dari semua pihak dalam melaksanakan program pemerintah ini untuk mensejahterakan masyarakat kecil yang kesulitan mendapatkan rumah hunian. “Kami sangat membutuhkan bantuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan rumah ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Terutama yang berkaitan dengan hal perizinan, pertanahan, listrik, air bersih, perbankan dan lain-lainnya. Jika salah satu di antaranya tidak berjalan, maka akan menghambat pemerintah dalam upaya mewujudkan program satu juta rumah,” imbuh Junaidi.

Lebih jauh dikatakannya, Kalsel selama ini menjadi salah satu penyuplai rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan termasuk dalam 10 besar pada tahun 2023, dengan suplai sekitar 10.000 unit rumah MBR bersubsidi.

“Dan tahun ini, baru Mei sudah merealisasikan kurang lebih 2.700 unit rumah MBR. Harapannya, di akhir tahun nanti bisa tembus di atas 10.000 unit rumah bagi MBR,” beber Junaidi. Menurutnya, sangat penting untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dengan program merumahkan rakyat Indonesia melalui KPR.

Sedangkan, Ketua DPD Apersi Kalsel yang baru, Hj Wahidah Mukhtar, menambahkan jika jumlah anggota Apersi Kalsel dari tahun ke tahun terus bertambah.

“Dari data yang ada, jumlah anggota kami sebanyak 237, dan yang aktif sekitar 200 anggota. Yang mana semuanya merupakan pengembang perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dan ini juga menjadi nawacita Presiden Joko Widodo dengan Program Satu Juta Rumah,” ungkapnya.

Di Kalsel lanjut Wahidah, Apersi menyumbang sebanyak 40 persen total target realisasi yang ada di Bumi Lambung Mangkurat. “Kami juga selalu mengimbau anggota-anggota Apersi Kalsel agar menjaga kualitas rumah MBR yang mereka bangun, dan sesuai arahan Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadimoeljono,” ujarnya.

Wahidah juga mengatakan, dari 40 persen partisipasi Apersi di Banua ini masih terdapat banyak badlock hunian. Di mana pada 2023 lalu angka badlock hunian di Kalsel mencapai 171 unit rumah yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Kalsel. Dan ini tentunya menjadi tantangan untuk menurunkan angka badlock tersebut setiap tahunnya.

“Permasalahan yang saat ini sering menjadi kendala adalah tingginya harga lahan, birokrasi perizinan, proses sertifikat, infrastruktur, serta ketersediaan pasokan listrik dan air bersih,” ungkap Wahidah. “Dan target Apersi Kalsel di 2024 ini sebanyak 9.000 rumah dari 200 anggota aktif Apersi. Semoga target ini bisa tercapai,” pungkasnya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa penyerahan bendera pataka dan penandatanganan surat keputusan yang dilakukan Ketua DPP Apersi Pusat, Daniel Djumali bersama dengan Ketua terpilih DPD Apersi Kalsel, Wahidah Mukhtar, menandai resminya kepengurusan DPD Apersi Kalimantan Selatan periode 2024-2028.

Acara pengukuhan yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin ini, dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor yang mendukung target Apersi untuk memberikan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Usai dilantik, pengurus DPD Apersi Kalsel, siap bersinergi dengan pemerintah dan menargetkan membangun 12 ribu unit rumah subsidi untuk mendukung Kalimantan Selatan sebagai pintu gerbang ibu kota negara.

Ketua DPD Apersi Kalsel, Wahidah Mukhtar, menjelaskan pihaknya akan langsung bergerak dan menyatukan visi dan tentunya akan melakukan berbagai kordinasi dengan pemerintah dan stake holder untuk menunjang pembangunan.

“Alhamdulillah tentu kita akan menyatukan visi dulu. tentu kita berharap IKN ini bisa memberikan dampak ke kita. Memang tahun lalu kita target 10 ribu dan tercapai 7 ribu dan kita terget sekarang 12 ribu dan berharap bisa lebih meningkat. Namun kita menunggu kuota yang diberikan pemerintah,” kata Wahidah Mukhtar, Ketua DPD Apersi Kalsel. “Tentu kita harap DPD ini mendukung kita dalam pembangunan rumah ini. Dan kita memang targetkan di daerah itu 10 ribu,” tutur Daniel Djumali, Ketua DPP Apersi.

Sementara itu, dalam kegiatan ini pihak apersi kalsel juga menggelar pemaparan perbankan dan diakuasi dengan pihak pemerintah seperti Dinas PUPR dan kementerian ATR dan BPN.

Sumber Berita

1. <https://klikkalsel.com/usai-dilantik-dpd-apersi-kalsel-targetkan-bangun-12-000-unit-rumah-subsidi/>, Usai Dilantik, Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Kalimantan Selatan Targetkan Bangun 12.000 Unit Rumah Subsidi, (07/05/2024).
2. <https://dutatv.com/dpd-apersi-kalsel-targetkan-bangun-12-000-unit-rumah-subsidi/>, Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Kalimantan Selatan Targetkan Bangun 12.000 Unit Rumah Subsidi, (07/05/2024).

Catatan:

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

1. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai menyebutkan rumah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi orang pribadi Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana diatur dalam undang- undang mengenai perumahan dan kawasan permukiman.
2. Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2023 menyebutkan bahwa rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau rumah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. luas bangunan minimal $21 m^2$ (dua puluh satu meter persegi) sampai dengan $36 m^2$ (tiga puluh enam meter persegi);
 - b. luas tanah minimal $60 m^2$ (enam puluh meter persegi) sampai dengan $200 m^2$ (dua ratus meter persegi);
 - c. harga jual tidak melebihi batasan harga jual, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - d. merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak dimiliki.

3. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2023 menyebutkan bahwa program kepemilikan rumah umum dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian bantuan dan kemudahan pemerintah untuk kepemilikan rumah umum berupa subsidi bunga, subsidi uang muka, atau pembiayaan tabungan perumahan rakyat.

4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dalam Diktum Kesatu menetapkan batasan luas tanah, luas lantai, dan batasan harga jual rumah umum tapak dalam pelaksanaan kredit/pembiayaan perumahan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, serta besaran subsidi bantuan uang muka perumahan, dengan rincian sebagai berikut :

A. Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah Umum Tapak

Jenis Rumah	Luas Tanah (Meter Persegi)		Luas Lantai Rumah (Meter Persegi)	
	Paling Rendah	Paling Tinggi	Paling Rendah	Paling Tinggi
Rumah Umum Tapak	60	200	21	36

B. Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak

No	Wilayah	Harga Jual Maksimal (Rp)	
		2023	Mulai 2024
1.	Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatera (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai)	162.000.000	166.000.000
2.	Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu)	177.000.000	182.000.000
3.	Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas)	168.000.000	173.000.000
4.	Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Mahakam Ulu	181.000.000	185.000.000
5.	Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan	234.000.000	240.000.000

C. Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan

No	Wilayah	Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka (Rp)
1.	Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan	10.000.000
2.	Provinsi Selain Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan	4.000.000